

**MALUKU :**  
**SEBUAH CITRA DALAM BINGKAI SUMBER DAYA**  
**ARKEOLOGI**

Marlon NR Ririmasse<sup>1</sup>

*Abstrak*

*Maluku adalah wilayah dengan sumber daya budaya yang beragam sebagai implikasi kondisi geografis yang berciri kepulauan. Meski demikian, keragaman sumber daya budaya ini ternyata belum mampu untuk memberikan sumbangan yang berarti pembangunan daerah sebagaimana belum mampu untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Makalah ini mencoba untuk melihat sumber daya budaya dalam bingkai arkeologi dengan menitikberatkan kajian pada aspek pengelolaannya serta bagaimana sumber daya budaya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan daerah Maluku*

Kata Kunci: Sumber Daya Budaya, Arkeologi, Pengelolaan, Maluku

*The Spice Islands*, itulah istilah yang diberikan oleh bangsa-bangsa asing (Eropa) bagi kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah pada masa lalu. Cengkih dan pala memang seperti primadona cantik yang tumbuh alami di tanah Maluku. Adalah aroma wangi cengkih dan pala, yang membawa bangsa-bangsa asing Cina, Arab, dan Eropa rela menempuh perjalanan panjang dan berbahaya untuk mencapai kepulauan ini. Meminjam istilah Rijoli (1994) ‘buah-buah emas’ inilah yang merubah sejarah Maluku dan Nusantara masuk ke dalam satu era kolonialisme Eropa selama hampir empat abad, dan melahirkan negeri yang kita kenal sebagai Indonesia.

Citra Maluku memang seperti melekat dengan rempah-rempah dan kolonialisme Eropa. Sejarah panjang wilayah-wilayah seperti Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda adalah sejarah yang judulnya selalu melekat dengan rempah-rempah dan imperialisme Eropa. Pohon pala dan cengkih ternyata tidak hanya ‘berbuah emas’, namun juga membuahakan bukti-bukti materi kehadiran bangsa Eropa di Maluku dalam bentuk benteng, kota, rumah-rumah bergaya Eropa, *perk*, dan gereja.

---

<sup>1</sup> Staf Peneliti Balai Arkeologi Ambon

Kerangka citra masa lalu di Maluku harus diakui kental dengan ciri khas tinggalan-tinggalan bergaya kolonial. Mudah sekali untuk menemukan benteng-benteng peninggalan Eropa di berbagai pelosok wilayah Maluku. Budaya Eropa yang hampir lima ratus tahun mendominasi kehidupan politik di Maluku (dan Indonesia) meninggalkan begitu banyak jejak arkeologis yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah ini. Namun, melewati keseharian selama berabad-abad dengan tinggalan materi dengan nilai sejarah tinggi ini, tidak lantas membuat kita semua dekat, mengenal dan memahami cerita yang melingkupi benda-benda ini. Banyak bangunan kolonial yang dibiarkan terbengkalai begitu saja bahkan dirusak dengan sengaja. Fenomena jual beli tinggalan masa lalu juga bukan isu baru. Kondisi ini sebenarnya dilatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat Maluku tentang sesuatu yang menjadi bagian dari keseharian mereka. Padahal kekayaan budaya ini bila dikelola dengan benar adalah satu aset yang sifatnya multiaspek dan memberi manfaat multiguna.

Ragam tinggalan budaya materi masa lalu adalah bentuk sumberdaya budaya yang memiliki nilai guna yang besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Konstruksi citra tinggalan materi masa lalu di Maluku selama ini memang cenderung dipahami melalui bingkai kacamata tinggalan materi kolonial. Hal ini karena ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas, tinggalan dengan ciri kolonial umum dikenal dan lebih mudah dijumpai di berbagai wilayah Maluku. Konstruksi sejarah Maluku yang dekat dengan Eropa juga turut mempengaruhi *mindset* masyarakat tentang tinggalan arkeologis di Maluku. Yaitu bahwa citra purbakala, cenderung berasosiasi dengan produk materi masa kolonial.

Gambaran awal di atas adalah sebuah refleksi bahwa konstruksi citra kepurbakalaan di Maluku selama ini cenderung melekat dengan objek dan tinggalan dengan ciri kolonial. Padahal bila ditinjau lebih mendalam, konstruksi tinggalan materi masa lalu di Maluku memiliki bingkai yang lebih besar, lebih luas, dan lebih tua dari yang dibayangkan banyak orang di daerah ini. Hanya, selama ini kurangnya informasi tentang potensi sumberdaya arkeologi membuat masyarakat kurang paham tentang potensi arkeologis di wilayah ini. Makalah ini mencoba membuka wawasan kita semua, untuk melihat Maluku melalui bingkai arkeologi, yang adalah suatu sumber daya yang bila dikelola dengan sungguh-sungguh, akan membawa manfaat yang besar bagi pembangunan daerah. Dalam kajian ini, Maluku akan dilihat dalam

bingkai wilayah kerja Balai Arkeologi Ambon yang meliputi Maluku dan Maluku Utara namun titik berat pada wilayah Maluku, sesuai dengan tema penerbitan khusus kali ini.

Melihat kembali Maluku masa lalu dalam bingkai arkeologi, sebenarnya seperti menyusun kembali mozaik-mozaik budaya masa lalu yang membentuk Maluku yang kita kenal saat ini. Mozaik-mozaik itu terbentuk sebagai hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan interaksi antara manusia dengan manusia lain yang berproses dalam waktu dan melahirkan Maluku dengan segala kompleksitas budayanya saat ini. Sedyawati (1992) dalam tulisannya menjelaskan hakikat kebudayaan dapat dirangkum dalam dua teori dasar. Satu teori dasar mengatakan bahwa inti dari kebudayaan adalah nilai-nilai dan gagasan-gagasan, di mana segala tingkah laku manusia dan benda-benda yang dihasilkannya adalah bentuk manifestasi dari inti kebudayaan tersebut. Teori dasar lainnya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dan dihasilkan manusia senantiasa didorong oleh kebutuhan kelangsungan hidupnya secara biologis dan material; gagasan-gagasannya terbentuk karena kondisi-kondisi fisik dan ekonomis yang melingkupinya. Oleh sebagian kalangan kedua teori ini kemudian digabungkan untuk melihat kebudayaan sebagai suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling mempengaruhi secara timbal balik.

Dengan defenisi tersebut arkeologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, berusaha untuk menjelaskan kembali masa lalu melalui ragam bukti-bukti budaya materi yang dihasilkan. Upaya ini diwujudkan dalam upaya rekonstruksi sejarah kebudayaan masa lalu, upaya mengetahui cara-cara hidup masa lampau, dan menjelaskan bagaimana proses perubahan budaya itu terjadi.

Kondisi Maluku sebagai sebuah wilayah Kepulauan, bukan merupakan sebuah hambatan bagi manusia Maluku di masa lalu. Sebaliknya, kondisi alam ini mendorong terciptanya kreatifitas-kreatifitas lokal yang diwujudkan antara lain dalam bentuk benda budaya. Karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, justru menciptakan suatu profil budaya yang unik. Banyaknya jumlah pulau berimplikasi pada variasi budaya yang juga sangat beragam di Maluku. Sehingga, umum ditemui di Maluku banyak bahasa lokal dengan gaya dan dialek yang berbeda. Hal yang sama ditemukan juga dalam bentuk

hasil budaya seperti busana daerah, arsitektur, dan bentuk-bentuk kegiatan adat dan ritual. Kondisi geografis ini pula yang menciptakan suatu profil yang unik dalam bingkai sumber daya arkeologi. Setiap wilayah di Maluku memiliki ciri khas sumber daya arkeologi sebagai bentuk interaksi manusia di masa lalu dengan lingkungan, manusia, dan segala kompleksitas budayanya. Wilayah Maluku Utara memiliki potensi sumber daya arkeologi Islam yang besar. Keberadaan kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo meninggalkan jejak dalam bentuk berbagai tinggalan arkeologi dengan ciri Islam. Wilayah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara menyimpan potensi yang besar untuk pengembangan arkeologi prasejarah dan etno arkeologi. Dalam skala luas, tinggalan arkeologi kolonial tersebar merata di berbagai wilayah kepulauan ini sebagai bukti bentang sejarah kolonial yang panjang. Sumber daya arkeologi yang beragam, kondisi geografis yang unik, dan nostalgia citra sejarah masa lalu yang panjang, adalah sebuah kolaborasi unik sekaligus merupakan peluang potensial untuk dikembangkan. Bagaimana sebenarnya kekayaan sumber daya arkeologis di Maluku akan coba kita telaah dan gali satu persatu melalui makalah ini.

Konstruksi kronologis sejarah kebudayaan di Indonesia yang umum dikenal dibagi atas empat masa, yaitu, masa kebudayaan prasejarah, masa kebudayaan Hindu Budha, masa Islam dan Masa Kolonial. Pembabakan ini memang bukan patokan mutlak. Tidak setiap daerah di Nusantara ini mengalami proses pembabakan budaya seperti di sebutkan di atas. Papua misalnya, dapat dikatakan hampir tidak pernah bersentuhan dengan kebudayaan Hindu Budha. Sejalan dengan belum ditemukan data arkeologis dan sejarah yang membuktikan adanya interaksi budaya tersebut. Kronologi budaya di wilayah ini bisa dikatakan melompat dari masyarakat dengan ciri budaya prasejarah, masuk ke dalam bentang sejarah kolonial. Bahkan hingga saat ini masih umum ditemui kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang masih hidup dalam bentuk-bentuk budaya prasejarah. Berbeda dengan wilayah pulau Jawa. Di wilayah ini pembabakan sejarah memang berlangsung lebih runtut melalui tahapan-tahapan yang lebih kompleks. Mulai dari masa prasejarah, masa klasik (Hindu Budha), masa Islam, dan masa Kolonial. Perbedaan ini dimungkinkan karena posisi Jawa yang berada lebih dekat dengan perlintasan jalur pelayaran utama di Selat Malaka

yang menghubungkan pusat-pusat budaya seperti Persia, India, dan Cina. Keletakan geografis ini yang kemungkinan membuat wilayah barat Indonesia lebih mudah bersentuhan dengan bentuk-bentuk budaya baru dari luar.

Di Maluku hasil-hasil budaya prasejarah masih dapat diamati dengan jelas hingga saat ini. Bahkan pada beberapa wilayah tertentu, budaya prasejarah masih dijalankan sebagai bagian dari tradisi. Dalam bingkai arkeologi, tinggalan materi budaya prasejarah tersebar merata dari wilayah Maluku Utara hingga Maluku Tenggara. Hasil penelitian Balai Arkeologi Ambon telah mendata dan mendokumentasikan berbagai tinggalan arkeologi prasejarah di Wilayah ini. Salah satu hasil budaya materi prasejarah yang cukup banyak ditemukan di Maluku adalah *Dolmen* atau lebih dikenal sebagai *batu meja*. Sampai saat ini dolmen telah ditemukan di sekitar 16 lokasi situs di Maluku. Karakteristik dolmen di setiap situs berbeda. Ada situs yang memiliki beberapa dolmen, sementara pada situs lain hanya memiliki satu dolmen. Dolmen di tiap situs juga dapat berasosiasi dengan temuan lain seperti menhir, namun dapat juga berdiri sendiri. Kondisi dolmen di tiap situs juga berbeda, ada situs yang memiliki dolmen yang masih terawat sementara pada situs lain sudah rusak, pecah, dan tidak terawat. Dolmen dalam bentuk himpunan beberapa dolmen ditemukan antara lain di situs Kaibobu, Tuhaha, dan Iha. Di Tuhaha, dolmen-dolmen ditemukan berasosisasi dengan temuan lain seperti menhir. Di situs batu Perahu di Sangliat Dol, Maluku Tenggara Barat, Dolmen ditemukan sebagai bagian dari konstruksi bangunan batu perahu. Dolmen juga ditemukan di situs Oma, Kamariang, Tehoru, Soya, Haria, Tiouw, Ameth dan Amahusu. Dalam konstruksi sejarah lokal dolmen memiliki fungsi simbolik yang beragam. Di Tuhaha dan Kaibobu, dolmen berkorelasi dengan pola stratifikasi masyarakat di kedua desa ini. Sementara di desa-desa lain, dolmen umum difungsikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ritual pemujaan leluhur maupun sebagai sarana upacara pelantikan raja.

Selain dolmen, lukisan-lukisan pada ceruk dan gua juga merupakan hasil budaya prasejarah di Maluku. Di wilayah Sungai Tala Teluk Saleman, ditemukan lukisan-lukisan pada dinding karang dengan pola manusia, binatang melata, ikan perahu, burung, cap tangan, serta motif-motif geometris yang belum diketahui maknanya (Heekern, 1972 dalam Ririmasse, 2005). Lukisan prasejarah juga ditemukan di situs gua

Loh-Vat, Ohoidertawun, Kepulauan Kei. Di situs ini ditemukan lukisan dengan motif manusia dalam posisi menari, duduk, dan berkelahi. Juga ditemukan lukisan dengan pola perahu, gambar hewan, dan pola matahari. Lukisan-lukisan ini ditampilkan dalam warna merah dan kuning (Fadhlan dan Istari, 1996). Lukisan pada dinding karang juga ditemukan di wilayah Buru Selatan dengan motif cap tangan, bentuk manusia, perahu, dan bentuk-bentuk geometris lain (Suryanto, 1997). Lukisan prasejarah pada dinding gua ini adalah produk budaya masa *epi-paleolitik* (masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut) yang ditandai dengan corak kehidupan di dalam gua. Menurut Kosasih (1983) lukisan-lukisan gua ini umumnya berkorelasi dengan konsep religi tentang dunia sesudah mati. Artefak dengan ciri teknologi praksis seperti alat-alat batu ditemukan antara lain di situs Halmahera Maluku Utara. Di wilayah ini ditemukan artefak seperti beliung persegi, batu pipisan, batu pukul dan papan batu dengan motif muka manusia (Due Awe dan Fadhlan, 1994).

Di wilayah Maluku Tenggara indikasi kehidupan prasejarah menunjukkan ciri yang lebih kompleks. Di wilayah ini budaya prasejarah bahkan masih dijalankan sebagai tradisi. Situs-situs pemukiman banyak ditemukan di wilayah ini. Di situs Leti, Moa, Lakor terdapat kampung kuna dengan pola tata ruang berbentuk perahu. Di situs ini pemukiman kunanya menunjukkan ciri yang kompleks yang ditandai dengan adanya pagar-pegar batu (*dwala*) yang berukuran besar dan lengkap dengan kanal-kanal. Sementara di Sangliat Dol, Yamdena, ditemukan bangunan batu perahu yang masih digunakan untuk ritual adat hingga saat ini (Ririmasse, 2005). Pemukiman kuna lainnya juga ditemukan di wilayah Lingat, Pulau Selaru. Di situs ini pemukiman kunanya ditemukan berasosiasi dengan penguburan ceruk (Ririmasse, 2006). Konsep-konsep arsitektur tradisional Maluku nampak lewat gaya bangunan yang khas sebagaimana ditemukan pada bangunan-bangunan seperti Baileo (Balai Desa) di Maluku Tengah. Di wilayah Yalahatan, Tamilouw, Maluku Tengah, Baileu suku Naulu ditemukan memiliki pola-pola hias simbolik berbentuk binatang. Konsep totemistik ini juga nampak pola hias pada bangunan-bangunan tradisional di Tanimbar Kei. Budaya Prasejarah yang lekat dengan religi juga meninggalkan bukti-bukti materi berupa situs-situs penguburan kuna. Di Maluku situs penguburan antara lain ditemukan di pulau Babar, Maluku Tenggara,

Situs Enus Pusat, di Pulau Selaru, dan situs Aboru di Pulau Haruku. Jejak tradisi budaya logam di Maluku dicirikan dengan temuan berupa artefak perunggu seperti nekara. Artefak ini ditemukan antara lain di situs Leti, Vaan Letvuan dan Madwaer, serta baru-baru ini ditemukan di Gorom, Seram Bagian Timur. Keberadaan benda-benda perunggu ini sekaligus merupakan bukti interaksi Maluku dengan wilayah luar dan indikasi adanya migrasi dan perdagangan pada masa lalu.

Indikasi budaya klasik yang kental dengan ciri Hindu-Budha memang minim ditemukan di Maluku. Meski demikian bukan berarti tidak ada. Indikasi interaksi dengan budaya klasik nampak lewat temuan arca perwujudan Dewi Parwati, yang kini menjadi koleksi Museum Negeri Siwalima. Arca ini awalnya ditemukan di Ternate Maluku Utara, kemudian dipindahkan ke Ambon dan saat ini menjadi koleksi museum Siwa Lima. Indikasi budaya Hindu-Budha juga ditemukan di situs desa Ohivuur, Letvuan, Kei Kecil. Di situs ini terdapat dua buah makam yang dikenal sebagai makam Kasdev dan Dit Ratngil. Patung Kasdev dan Dit Ratngil yang terdapat di makam ini menunjukkan ciri khas gaya Jawa yang kuat. Masyarakat di Maluku Tenggara seperti Kei dan Selaru memang umumnya menyebutkan bahwa leluhur mereka berasal dari Bali. Suantika (2005), menyatakan kata *Ohoivuur* kemungkinan awalnya berasal dari kata *Ohoipura* yang artinya pagar kota Ohoi sebagaimana *letvuan* yang kemungkinan berasal dari kata *kedaton/kedatuan* yang artinya istana raja. Sementara *Kasdev* mungkin dari kata Kusuma Dewa, dan Dit Ratngil mungkin berasal dari kata Diah Ratna Manggali. Wilayah Maluku memang sudah dikenal sejak lama, bahkan dalam sumber sejarah Majapahit Maluku juga sudah tercatat. Wilayah seperti Gorom dan Kai sudah disebutkan dalam sumber-sumber sejarah Majapahit. Keberadaan bukti-bukti arkeologis ini meski dalam jumlah yang terbatas sesungguhnya dapat dijadikan refleksi terhadap citra pengaruh budaya Hindu Budha di masa lalu yang jangkauannya hingga ke kepulauan Maluku. Jika kemudian mengapa pengaruh budaya ini tidak terlalu berkembang, memerlukan kajian lebih mendalam di kesempatan lain.

Citra arkeologi Islam di Maluku tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam besar di wilayah ini. Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo adalah empat kerajaan besar di Maluku Utara yang lebih dikenal sebagai *Molucco Kie Raha*. Keberadaan keempat kerajaan menyatu dengan tumbuh dan berkembangnya era perdagangan



rempah-rempah di wilayah Maluku. *Moluco Kie Raha* pada awalnya terbentuk dari kelompok tradisional masyarakat yang ada di Maluku Utara yang dikenal dengan istilah *kolano*. Dalam perkembangan selanjutnya keempat *kolano* tersebut kemudian saling berebut pengaruh dan berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya (Mansyur, 2006). Bersamaan dengan meningkatnya intensitas perdagangan rempah-rempah pada abad ke-14 maka pengaruh dari keempat kerajaan ini juga meluas. Kondisi ini sejalan dengan keberadaan keempat kerajaan ini sebagai salah satu wilayah utama penghasil rempah-rempah di Maluku.

Sejarah menunjukkan bahwa dari keempat kerajaan ini Kerajaan Ternate dan Tidore-lah yang paling berpengaruh. Pengaruh politis dan militer kedua kerajaan ini dirasakan bukan saja pada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, namun mencapai juga wilayah-wilayah Maluku Bagian Selatan. Rentang sejarah yang panjang dari kerajaan Ternate dan Tidore telah melahirkan banyak kajian sejarah dan arkeologi tentang wilayah ini. Di Ternate bukti-bukti budaya materi arkeologi Islam ditunjukkan dengan keberadaan Masjid Jami (Agung), Kedaton Sultan Ternate, dan kompleks makam sultan-sultan lama. Selain bukti-bukti di atas, di Ternate juga ditemukan bukti arkeologis berupa naskah-naskah kuna yang oleh Ambary (1994) dikelompokkan menjadi naskah Al-Quran, naskah maklumat, dan surat kontrak. Sama halnya dengan di Ternate, Tidore juga memiliki tinggalan Islam berupa Masjid Jami Tidore, Situs Kedaton, dan kompleks makam Islam kuna. Di Maluku Tengah, meski gaungnya tidak sebesar kerajaan-kerajaan Islam di utara, perkembangan Islam tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kerajaan Islam Hitu di Jazirah Utara Pulau Ambon dan Kerajaan Iha di Saparua. Kedua kerajaan Islam ini pada masanya memiliki peran yang cukup menentukan dalam konstelasi sejarah lokal Maluku Tengah. Di Hitu saat ini, jejak budaya Islam masa lalu mewariskan data materi penting anatra lain masjid tujuh pangkat dan kompleks makam Islam kuna. Di Iha ditemukan bukti arkeologis berupa struktur masjid kuna, kompleks makam Islam, prasasti Islam dan naskah-naskah kuna.

Tinggalan kolonial harus diakui menjadi data arkeologis yang paling kasat mata di wilayah Maluku. Tinggalan dengan ciri kolonial seperti benteng tersebar hampir di semua wilayah kepulauan ini. Wilayah Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, memiliki benteng-benteng tinggalan kolonial yang cukup dikenal. Di Kota Ambon terdapat

benteng *Nieuw Victoria* yang dibangun tahun 1575 oleh Portugis dan kemudian digunakan Belanda sebagai sentra pemerintahan dan militer. Di jazirah Utara pulau Ambon juga terdapat benteng *Nieuw Amsterdam* di desa Hila Kaitetu. Wilayah Banda dengan segala nostalgia rempah-rempahnya, memiliki benteng-benteng berukuran besar yang tersebar diberbagai titik kepulauan ini. Benteng *Belgica*, *Nassau*, dan *Hollandia* adalah beberapa benteng yang terkenal dari Banda. Di Pulau Haruku terdapat benteng *Nieuw Zeelandia* dan *Fort Horn*, sementara di Pulau Saparua terdapat benteng *Duurstede* yang terkenal selama perang Pattimura. Menuju ke wilayah Maluku Tenggara kita akan menemukan benteng *Vollenhaven* dan *Delleshaven* di Pulau Kisar. Wilayah Maluku Utara sebagai titik penting perdagangan rempah-rempah di masa lalu, memiliki benteng-benteng seperti *Orange*, *Tollococo*, *Kalamata*, dan *Santo Pedro e Paulo* di Ternate. Selain benteng, bukti-bukti materi budaya kolonial juga direpresentasikan lewat tinggalan monumental lain seperti bangunan gereja, *perk*, dan sekolah. Dalam skala yang lebih besar, citra kolonial juga dapat diamati melalui kajian keruangan kota seperti Ambon dan Banda. Kedua kota ini adalah kota-kota yang dibangun pada masa kolonial. Ciri kolonial yang kuat masih nampak di Banda lewat berbagai bangunan dengan ciri kolonial di seantero sudut kota mungil ini. Di Ambon, hampir semua bangunan tinggalan kolonial (kecuali benteng Victoria) sudah hilang, namun struktur jalan kota, toponim, dan pola tata kota saat ini dapat dikatakan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan kondisi kota di era kolonial.

Selain ragam bukti budaya materi dalam konstruksi kronologi budaya di atas, masih ada aspek-aspek khusus yang dapat diamati dalam studi arkeologi di Maluku. Salah satu aspek yang menarik adalah kajian Etnoarkeologi. Titik berat dari kajian ini adalah berupaya mengkaji benda-benda peninggalan masa lalu melalui kelompok-kelompok masyarakat kontemporer (Hassanudin, 2002:2-3). Di wilayah Maluku potensi pengembangan etnoarkeologi masih sangat luas. Hal ini dapat diamati dari berbagai fenomena tradisi masa lalu yang masih berlanjut hingga saat ini. Di wilayah Maluku Tengah misalnya, kajian etno arkeologi masih sangat potensial dilakukan terhadap suku-suku asli yang mendiami wilayah Seram Tengah yang lebih dikenal sebagai *Naulu*. Pola hidup suku ini yang masih melestarikan cara hidup tradisional dan lekat dengan alam, dimanifestasikan dalam berbagai bentuk tradisi dan produk budaya materi. Jejak tradisi juga masih dapat

diamati pada berbagai desa lain di wilayah Maluku tentu dengan catatan berkaitan dengan penggunaan warisan budaya materi dalam bentuk tradisi. Di wilayah Seram Barat, Seram tengah, dan Lease, *dolmen* masih digunakan dalam asosiasi dengan berbagai kegiatan adat dan ritual masyarakat. Dalam kelompok masyarakat penggunaannya dolmen-dolmen ini juga berkorelasi sejarah dan asal usul kelompok mereka. Di wilayah Maluku Tenggara fenomena yang sama antara lain ditemukan antara lain di situs Sangliat Dol, Yamdena. Di situs ini masyarakatnya masih menggunakan objek batu perahu sebagai pusat kegiatan-kegiatan adat dan ritual.

Salah satu aspek penting lainnya dalam bingkai sumber daya arkeologi di Maluku adalah pentingnya pengembangan arkeologi maritim sebagai pusat perhatian kajian arkeologis di wilayah ini. Data-data menunjukkan potensi kajian arkeologis maritim di wilayah Maluku tidak hanya mencakup kemungkinan kajian terhadap kapal-kapal yang karam. Bingkai yang lebih luas perlu digunakan secara cermat untuk mengembangkan aspek penting ini. Sebagai wilayah kepulauan, sulit untuk menafikan peran kondisi geografis dalam pembentukan budaya masyarakat Maluku, utamanya yang berada di wilayah pesisir. Ragam hasil budaya materi dan tradisi di wilayah ini menunjukkan dengan jelas, kemampuan masyarakat Maluku untuk bukan saja beradaptasi, namun juga melakukan eksplorasi dan inovasi budaya yang berkiblat pada potensi maritim. Situs-situs kapal karam memang penting, utamanya yang berkaitan dengan plotting dan penentuan titik-titik lokasi di mana kapal-kapal tersebut karam. Aspek kedua berkaitan dengan kajian jalur pelayaran kuna, ke dan dari kepulauan Maluku, serta di dalam kepulauan Maluku sendiri. Kajian terhadap jalur pelayaran ini berkaitan erat dengan pendalaman kajian keruangan pada kota-kota pelabuhan kuna di Maluku lengkap dengan komponen-komponen pendukungnya seperti pelabuhan. Pada skala yang lebih luas kajian maritim dalam arkeologi di Maluku, tentu harus berkorelasi juga dengan bagaimana masyarakat memaknakan laut lewat hasil budaya materi dan tradisi sebagaimana nampak antara lain di Leti Moa Lakor dan Yamdena dengan konsep batu perahu dan denah kampung berbentuk perahu.

Penjelasan di atas setidaknya telah memberi gambaran, bahwa Masyarakat Maluku dengan segala keberadaan geografis dan budayanya

yang unik, telah mampu menghasilkan produk-produk budaya materi yang menunjukkan bagaimana mereka memaknai lingkungan hidupnya dengan segala kompleksitasnya. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah, bagaimana warisan budaya berharga ini akan dimaknakan oleh generasi saat ini? Jawaban untuk pertanyaan besar ini akan coba kita telaah lebih lanjut.

### **Kondisi SDA Saat Ini: Sebuah Cermin**

Bagaimana warisan budaya masa lalu Maluku dimaknakan dan dikelola saat ini, tidak akan pernah lepas dari konteks bagaimana sumber daya budaya ini akan dimanfaatkan. Pemahaman dimanfaatkan di sini tentu dalam koridor penerapan sudut pandang yang tepat yaitu agar pengelolaan warisan budaya dapat menampung kepentingan semua pihak, baik kalangan akademisi (Balai Arkeologi, Instansi Terkait, dan Universitas), Pemerintah Daerah, dan tentunya masyarakat. Untuk melihat bagaimana konsep pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan untuk menampung kepentingan semua pihak, tentu sudah seharusnya kita berkaca dulu dari bagaimana kondisi sumber daya budaya di Maluku saat ini termasuk bagaimana sumber daya budaya di wilayah ini selama ini dikelola.

Bila berkaca dengan jujur dan jernih, harus diakui bahwa sebagian besar objek dan situs arkeologis di Maluku tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya selama ini. Baik untuk objek yang bersifat artefaktual maupun objek yang bersifat monumental. Sumber daya arkeologis di hampir semua wilayah Maluku sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa jenis kasus yang umum ditemukan selama ini adalah:

1. Situs Arkeologi dimanfaatkan tanpa koordinasi instansi berwenang
2. Kondisi situs yang semakin rusak karena tidak adanya perhatian dan penanganan dari instansi berwenang
3. Situs dipugar dan diubah secara fisik tanpa koordinasi dengan instansi berwenang dan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pemugaran yang lazim
4. Situs arkeologi secara sengaja dirusak dan dimusnahkan

Beberapa contoh kasus utama yang kiranya dapat menjadi rujukan antara lain, pemanfaatan situs Benteng Nieuw Victoria oleh TNI AD sebagai lokasi kesatuan, termasuk perubahan-perubahan secara fisik yang dilakukan terhadap benteng ini. Contoh kasus lain adalah pemugaran total benteng *Amsterdam* yang jelas-jelas tidak mengindahkan prinsip-prinsip pemugaran yang berlaku.

Kondisi di atas terjadi karena beragam faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang dianggap mendorong kerusakan berbagai situs arkeologi di wilayah Maluku adalah:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu situs arkeologi serta fungsi dan perannya
2. Kurangnya sosialisasi arkeologi di tingkat masyarakat
3. Kurangnya perhatian pemerintah daerah
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
5. Konsep pengelolaan sumber daya arkeologi yang tidak jelas
6. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk kebutuhan pelestarian
7. Belum adanya instansi pelestarian seperti BP3 di wilayah Maluku.

Stigma yang selama ini muncul cenderung menyatakan kurangnya perhatian pemerintah daerah adalah faktor utama buruknya pengelolaan sumber daya arkeologis di wilayah Maluku. Padahal bila dilihat secara jernih, kurang bijak rasanya bila meletakkan tanggung jawab yang sedemikian besar tentang pengelolaan warisan budaya di pundak pemerintah semata. Keberadaan sumber daya budaya tidak dapat dilepaskan dari peran tiga *stakeholder* utama yaitu, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Jujur diakui, bahwa dalam paradigma yang selama ini berlaku, peran pemerintah dan akademisi terlalu mendominasi pengelolaan sumber daya arkeologi. Kondisi ini umum ditemukan di Indonesia termasuk juga di Maluku.

Pengalaman menunjukkan konsep pengelolaan yang dilakukan cenderung berkuat dalam lingkup kepentingan penelitian dengan label 'ilmiah' dan lingkup pelestarian dengan label pemerintah sebagai 'pamong'. Hal ini antara lain ditunjukkan lewat kenyataan bahwa kelompok akademisi dalam proses penelitiannya selama ini cenderung meletakkan masyarakat dalam posisi objek. Fenomena yang ditemukan dalam banyak kasus penelitian adalah, kelompok peneliti merasa

lebih 'tahu' tentang budaya masyarakat yang ditelitinya dibanding masyarakatnya sendiri. Dalam penelitian, akademisi seringkali datang dengan segenap perangkat pemikiran yang 'baku' dan dianggap benar, sehingga sering tidak mengakomodasi sudut pandang masyarakat setempat.

Dalam konteks pengelolaan pun berlaku setali tiga uang. Pemerintah sebagai pihak yang selama ini mendominasi proses pengelolaan sumber daya arkeologis selalu meletakkan masyarakat sebagai objek. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi tentang pengelolaan sumber daya budaya bisa dikatakan hampir tidak ada. Padahal, kepada masyarakatlah seluruh pengelolaan ini akan bermuara, sehingga sudah sepantasnya bila kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dijadikan titik tolak dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya arkeologis. Dengan tidak diakomodasinya sudut pandang masyarakat, muncul ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya arkeologi, di mana masyarakat sebagai pemilik sebenarnya sumber daya budaya justru tidak mendapatkan benefit yang seharusnya dari apa yang menjadi miliknya. Padahal, proses penelitian dan pengelolaan yang dilakukan akademisi dan pemerintah pendanaanya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Saat ini berkembang paradigma baru di arkeologi, yang berupaya untuk memberi peran yang lebih besar bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya arkeologi. Dalam paradigma baru ini masyarakat tidak lagi didudukkan sebagai objek, namun memiliki posisi sebagai subjek yang setara dengan pihak akademisi maupun pemerintah. Dalam paradigma baru ini, penelitian dan pengelolaan arkeologi akan berawal dari kebutuhan masyarakat dan akan bermuara pada masyarakat juga. Sehingga sudah seharusnya bila disediakan ruang yang lebih lapang bagi masyarakat untuk memaknakan sumber daya arkeologi sesuai dengan sudut pandang mereka, sekaligus mengambil peran yang lebih nyata dalam pengelolaannya. Pemerintah dan akademisi akan mengambil peran sebagai pelayan, penyaji, dan fasilitator dan bukan lagi sebagai pamong.

Penjelasan di atas setidaknya bisa memberi gambaran, bahwa tidak terpeliharanya berbagai situs arkeologi di wilayah Maluku tidak lepas dari konsep pengelolaan yang tidak tepat. Kesalahan dalam manajemen ini akhirnya bermuara pada sumber daya arkeologi itu sendiri dan masyarakat yang menjadi korban.

Kebijakan yang tidak tepat dan implementasi yang stagnan membuat berbagai situs di propinsi ini terlantar dan tidak terawat. Kalaupun ada upaya pemeliharaan itu masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan untuk tindakan pemugaran yang dilakukan, sudah umum dilaksanakan diluar kaidah-kaidah pemugaran yang lazim. Demikian pula dengan kondisi bahwa koordinasi antar stakeholder dapat dikatakan tidak berjalan. Sehingga setiap pihak dan instansi yang berkepentingan dengan sumber daya arkeologi dapat dikatakan berjalan sendiri-sendiri. Muara dari semua kesalahan manajemen ini adalah, masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya dari sumber daya arkeologi yang mereka miliki, meski dana pengelolaannya berasal dari pajak yang mereka bayarkan.

### **Merubah Paradigma, Membangun Citra Maluku: Bagaimana Memulainya**

Pengelolaan sumber daya arkeologi yang mengacu pada paradigma lama sudah dapat dikatakan gagal dalam memberi benefit yang maksimal bagi semua stakeholder. Ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya arkeologi akhirnya tidak menguntungkan bagi semua pihak. Dalam kondisi ini beban yang terlalu besar akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah, sementara kalangan akademisi bisa dikatakan akan terus berjalan ditempat bila mengacu pada paradigma lama. Stakeholder yang paling dikorbankan dalam kondisi ini tentunya adalah masyarakat sendiri. Sebagai pemilik sebenarnya dari sumber daya arkeologi, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena hampir tidak memiliki ruang untuk memaknai dan menikmati apa yang menjadi milik mereka sesuai dengan sudut pandang mereka.

Bergerak dalam paradigma pengelolaan sumber daya arkeologi yang baru, berarti meletakkan masyarakat sebagai titik tolak sekaligus tujuan seluruh proses pengelolaan tersebut. Ini artinya sumber daya harus dapat dikelola secara benar dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat, mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat, serta pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas. Sehingga sudah pada tempatnya jika perlu disusun terlebih dahulu langkah-langkah yang perlu diambil dalam

mewujudkan pengelolaan sumber daya arkeologi dalam paradigma baru ini:

- Pemetaan Masalah yang mencakup:
  - ◆ Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya arkeologi di Maluku
  - ◆ Membangun database informasi, kondisi, dan potensi sumber daya arkeologi di Maluku
- Koordinasi, yang mencakup:
  - ◆ Membangun jejaring informasi dan organisasi antar instansi terkait di Maluku
  - ◆ Bersama menyusun konsep pengelolaan sumber daya arkeologis di daerah. Kontribusi masing-masing instansi akan disesuaikan dengan TUPOKSI di tiap instansi.
- Implementasi, yang mencakup:
  - ◆ Menciptakan strategi implementasi yang sesuai dengan TUPOKSI tiap instansi namun tetap sinergis
  - ◆ Memberi ruang bagi tiap instansi terkait dalam berbagi tanggung jawab pengelolaan sumber daya arkeologi
  - ◆ Menciptakan suatu fungsi kontrol yang melibatkan semua pihak

Balai arkeologi sudah memulai dengan inventarisasi dan dokumentasi ragam sumber daya budaya yang terdapat di wilayah Maluku. Tinggal bagaimana selanjutnya membangun pusat data yang terintegrasi dan memiliki jalur untuk diakses publik yang seluas-luasnya. Begitu pula dengan instansi lainnya seperti Subdin Musjarla, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Pemerintah Daerah (Dinas pariwisata dan Bappeda) sebenarnya sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya budaya ini. Masalahnya hanya bagaimana merumuskan konsep koordinasi lintas lembaga terkait. Tentu dalam hal ini perlu juga dilibatkan sedini mungkin masyarakat dan rekan-rekan dari LSM untuk terlibat dalam penyusunan konsep pengelolaan ini.

Untuk itu dalam tahap selanjutnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai alternatif solusi terhadap masalah koordinasi antar lembaga yang muncul selama ini. Yang pertama kiranya dirasa sangat perlu agar komunikasi yang intens antar lembaga terkait. Bentuk komunikasi ini



setidaknya dapat diwujudkan dalam wadah pertemuan rutin seperti seminar untuk membahas masalah-masalah aktual seputar pengelolaan sumber daya budaya di daerah. Bila memungkinkan, lebih baik bila ditindak lanjuti dengan pembentukan semacam kelompok kerja bersama untuk menanggapi kasus per kasus sumber daya budaya yang memang perlu penanganan lintas sektoral. Dalam era digitasi seperti saat ini, membuka ruang komunikasi bersama secara online sepertinya akan lebih mempermudah semua lembaga terkait maupun orang-per orang dalam bertukar pikiran seputar masalah pengelolaan sumber daya budaya.

Apabila ruang komunikasi bersama telah tersedia, dan telah dibangun kesepahaman dan kepercayaan antar lembaga maka akan lebih mudah dalam membentuk suatu kerangka kerja sama untuk memetakan permasalahan pengelolaan sumber daya budaya di wilayah Maluku. Terlibatnya lebih banyak lembaga akan memberi cakrawala yang lebih luas dalam memetakan masalah secara lebih teliti dan memberi perspektif multi studi yang akan sangat membantu dalam merumuskan konsep solusi terbaik.

Titik tolaknya adalah, bila hendak membangun suatu basis sumber daya budaya yang mampu memberi benefit bagi daerah, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah membenahi dahulu pengelolaan sumber daya budaya tersebut. Pembenahan yang harus selalu diselaraskan dengan tujuan pengelolaan sumber daya budaya itu sendiri yaitu mengacu pada kepentingan akademis, kepentingan sosial, dan kepentingan ekonomis. Apabila implementasi pembenahan sumber daya budaya ini mampu dilaksanakan dengan seharusnya muaranya adalah terciptanya suatu citra baru. Citra dimana dalam bingkai akademis masyarakat mampu melihat dan memaknai sumber daya budaya sebagai suatu sumber daya pengetahuan untuk tujuan pencerdasan kehidupan bangsa. Citra bahwa sumber daya budaya dengan seluruh kompleksitas dan keunikan sejarahnya adalah jati diri yang membentuk karakter sosial-lokal yang bermuara pada terciptanya suatu citra nasion yang unik di antara kemajemukan berbagai budaya bangsa. Akhirnya dengan sumber daya budaya terkelola dengan baik, otomatis akan lebih mudah untuk dikemas dan dijual sebagai satu paket pariwisata yang mampu memberi benefit bagi pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas

## DAFTAR PUSTAKA

- Diman Suryanto, 1997  
*Laporan Penelitian Arkeologi Prasejarah di Kecamatan Buru Selatan Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Ambon.
- Frans Rijoli, 1994  
Buah Emas dari Banda, *Laporan Survey Pengadaan*, Museum Negeri Siwa Lima Ambon.
- Hassan Muarif Ambary, 1994  
**Laporan Penelitian Arkeologi Islam di Ternate, Maluku**, Proyek Penelitian Purbakala Propinsi Maluku, Ambon
- Hassanudin, 2002  
*Studi Etnografi dalam Arkeologi dalam Tradisi, Jaringan Maritim, dan Sejarah Budaya*, Lembaga Penerbitan Universitas Hassanudin, Makassar
- I Wayan Suantika, 2005  
*Visi dan Misi Balai Arkeologi Ambon dalam Kapata Arkeologi Vol 1 No 1*, Balai Arkeologi Ambon, Ambon.
- Kosasih, 1983  
*Lukisan Gua di Indonesia Sebagai Sumber Data Penelitian Arkeologi*, PIA III Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- M Fadhlan S Intan dan Rita Istari, 1996  
*Geologi dan Arkeologi Situs Gua Kepulauan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Propinsi Maluku*, **Laporan Penelitian Arkeologi Bidang Arkeometri**, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, bagian Proyek Penelitian Purbakala Maluku.

Marlon NR Ririmasse, 2005

*Jejak dan Prospek Penelitian Arkeologi di Maluku* dalam  
**Kapata Arkeologi Vol 1 No 1**. Balai Arkeologi Ambon

\_\_\_\_\_, 2006

**Laporan Penelitian Arkeologi Situs Lingat Pulau Selaru  
Maluku Tenggara Barat**, Balai Arkeologi Ambon

Syahrudin Mansyur, 2006

**Laporan Penelitian Arkeologi Situs Bacan Maluku Utara**,  
Balai Arkeologi Ambon

Rokhus Due Awe dan Fadhlán S Intan, 1994,

*Situs Halmahera Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku*,  
**Laporan Penelitian Arkeologi**, Pusat Penelitian Arkeologi  
Nasional